### BNN Bongkar Penyelundupan .....

Dari Halaman 1

BNN RI, Komjen Marthinus Hukom, di Batam, Senin (26/5/2025).

Sabu seberat sekitar 2 ton sabu ditampilkan ke publik. Terlihat, sabu tersebut dikemas dalam bungkusan teh China.

"Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan bentuk implementasi Asta Cita dan program prioritas Presiden tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba," kata Marthinus Hukom.

Konferensi pers ini juga dihadiri pihak terkait

lainnya yang ikut berperan menggagalkan penyelundupan sabu ini.

Bungkusan-bungkusan tersebut disusun di depan meja konferensi pers yang digelar di Batam, Kepri. Dalam satu kemasan teh, sabu tersebut beratnya diperkirakan sekitar 1 kilogram

Sabu tersebut diangkut Kapal MT Sea Dragon Tarawa yang disergap petugas pada Rabu (21/5) dini hari di perairan Karimun, Kepri. Petugas menemukan dus-dus tersembunyi pada kompartemen khusus di lambung kapal.

Dari kasus penyelundupan narkotika jenis sabu di Kapal MT Sea Dragon, tim gabungan membekuk 6 orang anak buah kapal (ABK), yang terdiri dari empat WNI dan dua WN asal Thailand.

Empat orang WNI yang ditangkap adalah HS, LC, FR, dan RH. Sedangkan ada 2 WN Thailand, berinisial WP dan TL

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

# Hidayah

Sabu Serang Indonesia Dari Halaman 1

lolos dan kini beredar bebas di tanah air?

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, dan lebih dari 17 ribu pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kondisi ini membuat laut Indonesia tidak hanya menjadi jalur perdagangan yang strategis, tetapi juga medan empuk bagi penyelundupan, termasuk narkoba.

Jalur laut memungkinkan pengiriman dalam jumlah besar tanpa terdeteksi, terutama jika dikemas secara rapi dan melibatkan jaringan transnasional. Dalam kasus Karimun, sabu dikemas dalam bungkus teh China, modus yang sering dipakai jaringan narkotika dari kawasan Segitiga Emas (Myanmar, Laos, dan Thailand), menandakan keterlibatan jaringan internasional yang terorganisasi.

Dengan begitu luasnya wilayah perairan, mustahil bagi aparat untuk mengawasi seluruh jalur laut secara fisik. Maka, tantangannya bukan sekadar memperbanyak kapal patroli, tetapi juga memanfaatkan teknologi: radar pantai, drone maritim, dan kecerdasan buatan untuk memetakan pola

Penyelundupan sabu 2 ton bukan kejahatan biasa. Ini adalah kejahatan terorganisasi lintas negara yang menjadikan Indonesia sebagai pasar besar. Dalam satuan konsumsi, 2 ton sabu bisa menghasilkan sekitar 10 juta dosis. Jika satu dosis dikonsumsi oleh satu orang, maka 10 juta anak bangsa bisa terdampak oleh barang haram ini.

Narkoba tidak hanya merusak tubuh dan mental, tetapi juga merampas masa depan generasi muda. Data BNN menunjukkan bahwa kelompok usia 15-35 tahun merupakan pengguna narkoba terbanyak di Indonesia. Artinya, narkoba menyerang inti kekuatan bangsa: kaum muda, pelajar, maha-

siswa, dan angkatan kerja produktif. Ironisnya, banyak kasus penyelundupan besar seperti ini berhenti pada penangkapan kurir atau awak kapal. Jaringan atas, pemodal, dan mafia pengendali justru luput dari jerat hukum. Tanpa keberanian dan ketelitian investigasi untuk membongkar aktor di balik layar, kita akan terus sibuk menangkap "ekor", sementara "kepala" terus bergerak di balik bayang-bayang hukum.

Melawan narkoba tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan. Harus ada integrasi dengan pendekatan sosial, edukatif, dan rehabilitatif. Generasi muda harus diperkuat dari dalam. Pendidikan anti-narkoba harus masuk dalam kurikulum sejak dini, tidak sebatas kampanye seremonial.

Selain itu, kita butuh lebih banyak pusat rehabilitasi yang terjangkau, bukan hanya bagi pengguna dari kalangan ekonomi atas,7 tetapi juga untuk mereka yang berasal dari

lapisan bawah yang rentan dimanfaatkan sindikat. Masyarakat pun perlu diberdayakan sebagai mitra dalam pengawasan lingkungan. Program desa atau kampung bersih narkoba tidak boleh hanya menjadi jargon, melainkan di-

jalankan dengan pendampingan yang serius. Korupsi dan Oknum Aparat

Masalah lain yang tak kalah serius adalah potensi keterlibatan oknum aparat. Beberapa kasus narkoba besar di masa lalu menunjukkan bahwa sindikat bisa menyusup hingga ke institusi penegak hukum. Bahkan, ada narapidana yang masih bisa mengendalikan peredaran narkoba dari dalam

Kita harus menyadari bahwa perang terhadap narkoba tidak akan pernah menang jika integritas aparat tidak dijaga. Penindakan internal dan pengawasan eksternal harus berjalan seiring, termasuk audit terhadap gaya hidup oknum tertentu

yang tidak sebanding dengan penghasilannya. Media massa dan jurnalisme investigatif juga memiliki peran penting dalam membongkar jaringan narkoba. Publik perlu terus diberi informasi akurat dan edukatif tentang bahaya narkoba, modus baru penyelundupan, serta perkem-

bangan penanganan kasus oleh aparat. Namun, media juga harus bijak agar tidak hanya berhenti pada aspek sensasional—misalnya menampilkan tumpukan sabu dan wajah pelaku tanpa membahas akar masalahnya. Fungsi media adalah mencerdaskan, bukan sekadar menge-

jutkan. Publik juga memiliki peran penting dalam membangun budaya sadar bahaya narkoba. Jika masyarakat memilih untuk tidak membeli, tidak memakai, dan tidak mendiamkan, maka pasar narkoba akan melemah dengan sendirinya. Sikap ini harus ditanamkan dari rumah, lingkungan pendidikan, dan

Kasus besar ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan narkotika nasional. UU Narkotika perlu diperkuat, khususnya dalam hal pelacakan aset, hukuman bagi pengedar besar, dan penyitaan hasil kejahatan. RUU Perampasan Aset, yang hingga kini belum disahkan, sangat penting agar negara tidak hanya menghukum pelaku, tapi juga mengambil kembali keuntungan yang mereka raup dari kejahatan.

tempat kerja.

Selain itu, perlu diplomasi regional dan kerja sama antarnegara yang lebih kuat untuk menghentikan suplai dari luar negeri. Selama suplai tidak ditutup, kita hanya akan menjadi ladang uji coba dan pasar menggiurkan bagi mafia narkotika.

Penyelundupan sabu 2 ton di Karimun adalah peristiwa yang mengejutkan, tetapi juga menggugah kesadaran. Ini bukan hanya urusan aparat penegak hukum, tetapi juga masalah nasional yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, politik, dan

budaya. Laut kita yang luas tidak boleh terus menjadi pintu masuk narkoba. Generasi muda tidak boleh terus menjadi korban. Dan negara tidak boleh kalah oleh sindikat.

Ke depan, perang terhadap narkoba harus lebih dari sekadar razia dan penangkapan. Ia harus menjadi gerakan nasional lintas sektor dan lintas kesadaran. Karena mempertahankan masa depan bangsa berarti memastikan anak-anak kita tumbuh di negeri yang bersih dari narkoba—dari laut hingga daratan.

#### KPK Sita Uang Rp24 M & 7 Bidang Tanah .....

Dari Halaman 1

miliar dan tujuh bidang tanah seluas 31.772 meter persegi dengan nilai taksiran sekitar Rp70

Sebelumnya, KPK sudah lebih dulu melaku-kan penyitaan atas pengembalian kerugian negara dalam bentuk uang sekitar US\$1,42 juta dan aset beberapa bidang tanah dengan luas lebih dari 3 hektare di wilayah Jabodetabek.

"Tentu upaya ini sebagai bagian dari langkah awal dalam asset recovery untuk mengoptimalkan pemulihan keuangan negara," ucap Budi.

Dalam kasus ini, lembaga antirasuah tengah memproses hukum dua orang sebagai tersangka. Mereka ialah Direktur Komersial PT PGN periode 2016-Agustus 2019 Danny Praditya dan Direktur Utama PT Isargas 2011-22 Januari 2024 sekaligus Komisaris PT IAE 2006-22 Januari 2024 Iswan Ibrahim.

Kasus ini bermula pada 19 Desember 2016, Dewan Komisaris dan Direksi PT PGN mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PGN tahun 2017. Dalam RKAP tersebut, tidak terdapat rencana PT PGN untuk

membeli gas dari PT IAE.

PT IAE mendapatkan alokasi gas dari Husky Cnooc Madura Ltd (HCML) dengan rencana penyerapan gas PT IAÉ (pasca-realokasi sementara ke PT Petrokimia Gresik) pada tahun 2017 sebesar 10MMSCFD, tahun 2018 sebesar 15MMSCFD dan tahun 2019 sebesar 40MMSCFD.

Pada bulan Agustus 2017, Danny Praditya memerintahkan Adi Munandir (Head of Marketing PTPGN) untuk melakukan pemaparan kepada beberapa trader gas termasuk PT Isargas guna menjadi Local Distributor Company (LDC) PT

Pada 31 Agustus 2017, Adi Munandir melaksanakan perintah Danny Praditya untuk menghubungi Sofyan selaku Direktur PT IAE terkait

kerja sama pengelolaan gas. Pada 5 September 2023, Danny Praditya memerintahkan Adi Munandir untuk melakukan pertemuan dengan pihak Isargas Grup di kantor PTPGN guna membahas kerja sama pengelolaan

Dalam pembahasan tersebut, Sofyan selaku perwakilan dari Isargas Grup menyampaikan

arahan dari Iswan Ibrahim untuk meminta uang muka sebesar US\$15 juta berkaitan dengan rencana pembelian gas PT IAE oleh PT PGN.

Uang muka tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban atau utang PT Isargas kepada pihak lain. Hal ini kemudian dilaporkan oleh Adi Munandir kepada Danny Praditya.

Pada periode September-Oktober 2017, Danny Praditya memerintahkan Tim Marketing PT PGN yaitu Adi Munandir dan Reza Maghraby membuat kajian internal terkait rencana pembelian gas dari PT IAE, padahal pembuatan kajian itu adalah tugas pokok dan fungsi dari bagian Pasokan Gas PT PGN.

Selanjutnya pada 10 Oktober 2017 dalam rapat Board of Directors (BOD) PT PGN, Danny Praditya bersama-sama dengan Tim Marketing PT PGN memaparkan materi 'Update Komersial' yang antara lain berisi Isargas Grup menyatakan setuju untuk menjual sebagian alokasi gas bumi ex-HCML miliknya kepada PT PGN dengan permintaan skema pembayaran di muka.

Isargas Grup disebut juga menawarkan peluang akuisisi sebagian atau seluruh saham Isargas kepada PT PGN.(cnni/js)

#### 11 Mobil dan 2 Motor Disita di Kasus .....

Dari Halaman 1

bahan penyitaan: dua mobil dari pemeriksaan saksi, serta satu mobil dan satu motor dari hasil penggeledahan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (26/5).

Budi menuturkan belasan kendaraan tersebut disita penyidik setelah menggeledah sejumlah tempat seperti Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan hingga rumah kediaman para pihak yang diduga terkait dengan perkara di wilayah Jabodetabek.

KPK sudah melakukan pemeriksaan saksi di tahap penyidikan untuk melengkapi berkas perkara delapan tersangka yang sampai saat ini belum diumumkan ke publik.

KPK menduga pegawai di Ditjen Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan memungut atau memaksa seseorang memberikan sesuatu dan atau menerima gratifikasi terhadap para calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indone-

Tindak pidana itu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 B Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Total tersangka delapan orang.

"Untuk pihaknya secara detail nanti kami sampaikan pada kesempatan berikutnya," ucap

Berikut daftar lengkap kendaraan yang telah dilakukan penyitaan penyidik:

- 1. BMW Type Z3 Merah 2. BMW Type 3201 Putih
- 3. Honda Čivic Abu-abu
- 4. Wulling Airev Pink 5. Wulling Airev Putih
- 6. Honda Brio Merah 7. Honda HRV Hitam
- 8. Mitsubishi Xpander Hitam
- 9. Innova Hitam
- 10. Mitsubishi Pajero Dakar Hitam 11. Honda WRV Åbu-abu
- 1. Vespa Primavera Biru 2. Honda ADV Putih
- (cnni/js)

#### Panglima TNI Janji Ubah SOP .....

Dari Halaman 1

dilakukan di Garut sebelumnya telah jauh dari pemukiman warga.

Hanya saja, menurutnya, amunisi yang sudah kedaluwarsa atau expired lebih sensitif. Agus mengatakan kasus tersebut akan menjadi masukan buat pihaknya agar personal bisa lebih

"Hanya memang yang tadi saya sampaikan, jadi amunisi yang sudah expire itu memang mudah, mudah meledak, sehingga memang harus hati-hatian dan memang ini jadi masukan buat

kita, SOP-nya nanti akan kita ubah, supaya personel yang melaksanakan pemusnahan itu bisa aman. Kita koreksi ke dalam," kata Agus.

Agus mengakui rapat bersama Komisi I DPR turut membahas insiden ledakan saat pemusnahan amunisi milik TNI di Garut. Rapat digelar tertutup karena menyangkut isu strategis yang

Namun, Agus mengungkap dalam kasus ledakan di Garut pihaknya telah menerapkan

"Salah satu yang dibahas tadi adalah peledakan di Garut, dimana sudah saya sampaikan

bahwa prosedur untuk peledakan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP," kata dia.

Insiden yang terjadi pada Senin (12/5) pagi itu menewaskan 13 orang termasuk warga sipil. Pihak TNI menyatakan warga sipil yang turut menjadi korban tewas diduga pemulung yang berupaya mengumpulkan sisa-sisa logam dari bekas ledakan, seperti serpihan granat dan

Namun pihak keluarga membantah dan menyebut korban selama bertahun-tahun sudah terbiasa dipekerjakan TNI untuk membantu memusnahkan amunisi afkir.(cnni/js)

## KPAI Desak Dedi Mulyadi Hentikan Pengiriman

Dari Halaman 1

"Hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi," kata Jasra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin

"Karena dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak. Terutama labeling dan non-diskriminasi," sambungnya.

Jasra menjelaskan, hasil pengawasan KPAI juga merekomendasikan agar sarana dan prasana untuk pendidikan anak di barak militer diper-

Tak hanya itu, ia mengatakan pelatih siswa

di barak militer juga harus dievaluasi oleh Dedi Mulyadi dan jajaran agar tak melatih dengan

perspektif militeristik. Sebab, kata dia, upaya mendidik anak tak bisa dilakukan dengan pendekatan militeristik melainkan harus dilakukan dengan upaya yang

komunikatif. "Karena bagaimanapun juga melatih anak itu berbeda dengan melatih militer. Jadi perspektif pelindung anak itu harus ada. Dan bahkan kita dorong harus ada safe child guarding ya,"

"Bagaimana etika berhadapan dengan anak, bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana memahami anak adalah anak," sam-

Di sisi lain, Jasra mendorong agar Pemprov Jawa Barat agar terus memantau perkembangan anak yang telah lulus pendidikan di barak

pendidikan di barak militer tak hanya terjadi sesaat setelah mereka pulang pendidikan. "Yang baru kami pantau kan baru dari video-

Ia berharap kedisiplinan anak yang telah lulus

video yang ada, anaknya sudah patuh, anaknya tidak bolos sekolah, dan sebagainya. Nah harapannya seperti itu," ujar dia. "Tapi apakah itu tetap bertahan? Nah ini yang

mempersulit investasi para investor yang ingin

"Kita pastikan kepada seluruh investor yang mau

berinvestasi di Kabupaten Toba, pemerintah daerah

tentu yang menjadikan tangan kita ke depan," imbuhnya.(cnni/js)

# Martua Grup Akan Investasi di Toba .....

Dari Halaman 1

Karunia Prima Nastari (KPN) Properti Indonesia di ruang kerja nya di Balige, Senin (26/5).

KPN Properti Indonesia milik pengusaha besar Martua Sitorus direncanakan akan berinvestasi di Kabupaten Toba, tepatnya di kawasan Sibisa. Hal ini disampaikan oleh Margiman, Chief Operating Officer KPN Properti Indonesia saat audiensi dengan Bupati Toba Effendi Napitupulu.

Perusahaan ini direncanakan akan membangun Rotua Toba Resort di lahan seluas hampir 300 hektar

"Kami dari KPN Property, grupnya Bapak Martua Sitorus, ingin berinvestasi di Kabupaten

Toba untuk mengembangkan daerah pariwisata yang punya standar internasional. Kami sangat bersyukur Pak Bupati sangat mendukung upaya yang telah kami paparkan tadi," kata Margiman.

Saat ditanya jumlah investasi yang disebut-sebut mencapai hingga USD 500 juta, beliau menyebutkan, itu adalah angka perhitungan sementara untuk investasi jangka panjang, 15 sampai 20 tahun ke

"Itu masih perhitungan sementara dari perhitungan kami yang mungkin butuh waktu 15-20 tahun," jawabnya Menanggapi rencana yang disampaikan oleh

KPN Properti, Bupati Toba Effendi Sintong Na-

pitupulu menyambut baik. Dikatakan tidak akan

akan memberikan kemudahan. Yang pasti kita akan mengikuti seluruh regulasi dan aturan," ucap Ef-Diharapkan hal-hal yang dibicarakan dalam

berinvestasi di Kabupaten Toba.

dikerjakan. "Kita berharap apa yang kita diskusikan hari ini bisa segera kita tindaklanjuti pelaksanaannya dan bisa segera berlangsung pembangunannya di Kabupaten Toba," ujar Bupati Toba Effendi dengan penuh simpatik. (bin)

audiensi tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan

# Cerminan Kerapuhan Sistem Parkir Kota Medan ......

Dari Halaman 1

sudah membayar langganan justru kembali dikenai biaya, bahkan terjadi gesekan dengan juru parkir yang tidak memahami aturan atau cenderung bertindak semena-mena. Ini menandakan kegagalan integrasi antara sistem digital dan sumber daya manusia di lapangan.

Pemerintah Kota Medan seharusnya menjadikan kegaduhan ini sebagai alarm keras untuk mengevaluasi total sistem parkir yang ada. Evaluasi tersebut tidak cukup hanya secara teknis, tapi juga mencakup aspek pelayanan publik, kejelasan regulasi, serta pelatihan dan pengawasan juru parkir.

Penerapan sistem digital seperti barcode seharusnya membawa manfaat: transparansi pendapatan parkir, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kenyamanan warga. Namun bila tidak dikelola dengan baik, justru akan menjadi sumber konflik dan antipati publik. Sudah saatnya Pemko Medan membenahi sistem parkir secara menyeluruh -dari infrastruktur, regulasi, hingga manajemen SDM, agar transformasi digital benar-benar

memberi dampak positif bagi seluruh warga kota. Jika sistem tidak efektif, tidak adil, dan sulit

diawasi parkir berlangganan sebaiknya dihentikan. Namun jika ada potensi untuk diperbaiki dan dimodernisasi, maka bisa dipertahankan dengan reformasi besar-besaran, terutama dari segi teknologi dan pengawasan. Karena itu, meskipun sistem ini bertujuan untuk meningkatkan PAD dan mengurangi kebocoran retribusi parkir, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak warga yang telah membayar parkir berlangganan tetap diminta membayar tunai oleh juru parkir (jukir). Hal ini menimbulkan konflik antara masyarakat dan jukir serta menurunkan kepercayaan publik terhadap program ini.

Namun, jika masyarakat tetap diminta membayar uang parkir secara manual (tunai) kepada jukir, maka penggunaan barcode berlangganan menjadi tidak relevan atau kontradiktif, sehingga harus diubah sesuai kemampuan dan kebutuhan yang ada. Apalagi dalam banyak kasus para juru parkir liar sering mematok tarif yang tidak sesuai dengan peraturan. Hal ini merugikan masyarakat

dan menciptakan ketidakpastian tarif serta menimbulkan konflik sosial.

jakan parkir berlangganan masih menghadapi sejumlah masalah hukum dan administratif yang 26 Tahun 2024 Tentang Parkir Berlangganan tidak didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda). Perwal batasan hak warga tanpa melalui proses legislasi yang semestinya, yaitu melalui Perda yang melibatkan DPRD dan partisipasi publik. Perwal cacat secara substansi dan prosedural karena mengand-

Sebelumnya Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara juga telah merekomendasikan agar Pemko Medan mengkaji ulang kebijakan parkir berlangganan karena belum memenuhi kaidah hukum dan administrasi dalam penerbitan keputusan yang akan diterapkan secara luas ke

Selain itu, perlu dipahami dengan baik kebi-

signifikan. Secara hukum Perwal Medan Nomor memiliki dasar hukum yang kuat karena tidak tersebut tidak mengikat karena mengatur pemung larangan dan sanksi yang seharusnya hanya dapat diatur dalam Perda atau Undang-Undang.

masyarakat.(\*)